
STUDI TENTANG POSISI KASHMIR DALAM HUBUNGAN INDIA-PAKISTAN

Chairul Aftah¹

Abstract

This article highlights the unfinished disputes between India and Pakistan in the issue of Kashmir, and it is argued that the disputes on Kashmir have become an obstacle in enhancing the relationships or cooperation between the two countries. The opposing views and claims on this issue hamper the efforts to solve the conflict. India claims all of Kashmir areas as its own areas, and so does Pakistan. Currently, the disputes still exist although some agreements have been made to solve the existing problems. The data presented in this article is secondary data obtained through library research.

Keywords: *Kashmir, India, Pakistan, inter-state conflict.*

Pendahuluan

India dan Pakistan adalah dua negara bertetangga di Asia Selatan yang pernah menjadi wilayah jajahan Inggris. Pada waktu Inggris menjajah yang ada hanya India, sementara Pakistan belum ada. Tapi karena perbedaan pendapat dan pandangan para pemuka India saat Inggris memberikan kemerdekaan maka lahirlah India yang merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947 dan Pakistan yang merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947.

Lahirnya dua negara merdeka yang berasal dari satu kesatuan tidak menjamin kehidupan bertetangga keduanya berjalan dengan aman dan tenang. Malah sebaliknya, keduanya terlibat dalam pertikaian panjang yang muncul sejak keduanya merdeka sampai sekarang. Hubungan kedua negara tidak pernah akur. Walaupun kelihatan baik, sebenarnya menyimpan masalah yang sewaktu-waktu dapat menyeret keduanya pada konflik-konflik yang berujung kekerasan.

Rasa curiga dan prasangka merupakan warisan kolonial Inggris, yang telah membagi anak benua Asia itu secara tergesa-gesa dan tidak seimbang. Inggris meninggalkan persoalan-persoalan yang belum selesai. Termasuk asset negara,

¹ Staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda.

angkatan bersenjata serta penguasa dari kerajaan (negara bagian). Isu-isu yang dibiarkan menggantung itu akhirnya menimbulkan masalah kewilayahan yang rumit (*Kompas*, 10 Januari 2004).

Satu masalah yang sampai sekarang belum selesai adalah status wilayah Jammu-Kashmir—dalam artikel ini disebut Kashmir. Ini merujuk pada klaim penguasaan seluruh wilayah Kashmir, bukan hanya sebagian seperti sekarang ini. India dan Pakistan masing-masing mengklaim bahwa Kashmir adalah bagian integral negaranya. Pada kenyataannya sekarang, India menguasai dua pertiga sedangkan Pakistan menguasai sepertiga wilayah Kashmir.

Wilayah yang Diperebutkan

Wilayah yang diperebutkan India dan Pakistan adalah Kashmir. Tapi wilayah yang dimiliki penguasa Hindu bukan hanya Kashmir. Berikut adalah wilayah yang masuk dalam Princely State Jammu-Kashmir:

1. Jammu, sebagai pusat Princely State Jammu-Kashmir. Mayoritas penduduk dari wilayah ini adalah kaum Hindu dan Sikh, yang dipimpin oleh raja Hindu dari keturunan Rajput—pada waktu India merdeka rajanya adalah Hari Singh. Tapi di wilayah ini terdapat dua distrik yang dihuni mayoritas Muslim, yakni distrik Rasi dan Minpur yang masuk Kashmir Pakistan. Tahun 1941 jumlah penduduk kedua distrik ini mencapai 1.561.580 jiwa.
2. Lembah Kashmir—biasa disebut Kashmr—yang beribukota di Srinagar. Penduduknya adalah mayoritas Muslim Sunni yang berjumlah 1.615.500 dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 1.728.600 jiwa (pada tahun 1941). Dengan demikian sekitar 90 persen penduduk Kashmir adalah Muslim.
3. Ladakh. Pada tahun 1941 dihuni oleh sekitar 40.000 jiwa, yang hampir seluruhnya adalah keturunan Tibet dan beragama Budha.
4. Baltistan dengan pusat kota di Skarda. Wilayah ini dihuni oleh keturunan Tibet yang beragama Islam bermazhab Syiah. Tahun 1941 penduduknya berjumlah 160.000 jiwa
5. Wilayah Hunza, Nagar, Gilgit, Chilas, Astor, Yasin, Ishkuman serta sebagian Daldistan, yang dihuni sekitar 100.000 jiwa (1941) yang beragama Islam bermazhab Syiah.

Akar Konflik

Permasalahan Kashmir tidak terlepas dari Inggris sebagai penjajah. Paska PD II Inggris tidak dapat mampu membiayai koloninya termasuk India. Akhirnya Inggris membagi dan memberi kemerdekaan kepada wilayah India yang terbagi menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Partisi (pemisahan) kedua negara ini disebabkan oleh tidak adanya kesepakatan antara Liga Muslim yang menginginkan sebuah negara sendiri untuk Muslim di Asia Selatan. Di lain pihak Kongres India

mendukung mereka yang beragama Hindu yang menginginkan sebuah negara yang didasari oleh nasionalisme sekular (non-religius), termasuk wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim.

Setelah ada kesepakatan akan dibaginya bekas jajahan Inggris itu menjadi dua negara, persaingan semakin tajam mengenai status Jammu-Kashmir, Junagadh dan Hyderabad, yakni apakah akan bergabung dengan India atau Pakistan. Ini karena agama penguasa dan agama mayoritas penduduk tidak sama. Untuk Junagadh dan Hyderabad, penguasanya Muslim tetapi mayoritas penduduknya beragama Hindu. Dalam partisi India-Pakistan, Junagadh dan Hyderabad masuk menjadi negara bagian di India. Junagadh masuk ke India setelah diadakannya plebisit (penentuan pendapat). Sedangkan Hyderabad masuk ke India karena adanya paksaan setelah terjadi pendudukan militer oleh tentara India. Sementara di wilayah Kashmir penguasanya beragama Hindu, sedang rakyatnya mayoritas Muslim.

Doktrin Kerajaan Inggris terhadap raja-raja dikoloninya adalah kerajaan itu cukup independen sejauh mengakui kekuasaan (*paramountcy*) tahta Inggris terhadap mereka. Maharaja bisa melaksanakan semua kekuasaannya kecuali untuk pertahanan, komunikasi dan urusan luar negeri. Pada waktu akhir kekuasaan Inggris, penguasa atau raja muda (*viceroi*) Inggris di India, Lord Louis Mountbatten, menyampaikan kepada Maharaja Kashmir untuk memilih ikut India atau Pakistan. Kashmir tidak diberi celah untuk menjadi negara merdeka. Ia juga menyatakan bahwa untuk wilayah perbatasan yang penduduknya Muslim terbesar harus bergabung dengan Pakistan (Ganguly 2005).

Pakistan menganggap wilayah Kashmir harus menjadi bagiannya karena penduduknya mayoritas muslim. Seperti di Hyderabad dan Junagadh pertimbangan mayoritas penduduknya yang beragama Hindu mengakibatkan Pakistan tidak terlalu mempermasalahkan ketika bergabung dengan India. Disisi lain oleh India, Kashmir diharapkan bergabung dengan India untuk membuktikan bahwa mayoritas Muslim di sebuah negara bagian bukanlah sebuah ancaman dalam konteks sebuah India yang sekular. Sementara di sisi lain, Maharaja Hari Singh berusaha agar kerajaannya dapat merdeka, dengan memperlambat keputusannya untuk memilih India atau Pakistan sampai terjadinya partisi. Maharaja akhirnya memilih bergabung dengan India (Ganguly 2005) dengan penyerahan kekuasaan, khususnya bidang pertahanan, luar negeri, dan komunikasi kepada pemerintah India. Penyerahan kekuasaan inilah yang menjadi dasar klaim India atas Kashmir (*Kompas*, 7 Januari 2002).

Perang India-Pakistan

Pada bulan Oktober 1947 terjadi pemberontakan oleh suku Pashtun yang tinggal di sebelah barat wilayah Kashmir terhadap Maharaja Hari Singh. Pemberontakan ini menentang kekuasaan Maharaja yang selama ini mendapat dukungan Inggris untuk menekan mereka. Kesempatan ini digunakan Pakistan untuk

menduduki wilayah Kashmir dengan mengirim pasukan untuk mendukung pemberontakan tersebut. Pasukan Pakistan masuk ke wilayah Kashmir yang pada waktu itu belum bersikap untuk bergabung dengan India atau Pakistan.

Maharaja Hari Singh lalu meminta bantuan militer dari pemerintah India pimpinan PM Pandit Jawaharlal Nehru. Nehru berjanji akan membantu jika Hari Singh menerima dua syarat India. *Pertama*, maharaja harus menyetujui untuk bergabung dengan India. *Kedua*, harus mendapat restu dari Sheikh Muhammad Abdullah sebagai pemimpin dari konferensi nasional Jammu-Kashmir yang sekular dan pro untuk bergabung dengan India. Pada 27 Oktober 1947 tentara India diterjunkan ke Srinagar untuk berhadapan dengan pemberontak dan tentara Pakistan. Beberapa bulan kemudian tentara India dapat merebut daerah-daerah yang dikuasai oleh pemberontak dan tentara Pakistan. Pertempuran India-Pakistan yang pertama ini berlangsung sampai tahun 1948.

Kemudian Nehru meminta kepada PBB untuk menyelesaikan masalah konflik ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi No. 47, April 1948. Yang mengingatkan Pakistan agar menghentikan agresinya. Selanjutnya akan diadakan Plebisit bersama dengan India yang diikuti oleh seluruh rakyat Kashmir untuk menentukan posisi terakhir kerajaan itu untuk bergabung dengan India atau Pakistan. Berikut resolusi PBB tersebut:

Nothing with satisfaction that both India and Pakistan desire that the question of the accession of Jammu and Kashmir to India or Pakistan should be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite, Considering that continuation of the dispute is likely to endanger international peace and security. Recommends to the governments of India and Pakistan the following measures as those which in the opinion of the council are appropriate to bring about a cessat of the fighting and to create proper conditions for a free and impartial plebiscite to decide whether the state of Jammu and Kashmir is to accede to India or Pakistan. The government of India should undertake that there will be established in Jammu and Kashmir a plebiscite as soon as possible on the question of the accession of the state to India or Pakistan.²

Mengenai akan diselenggarakannya plebisit seperti yang dimaksudkan PBB dalam resolusi No. 47 tersebut juga ditanggapi positif oleh PM India, Pandit Jawaharlal Nehru. Berikut beberapa pernyataannya:³

²UN Resolution, Resolusi-resolusi PBB tentang Kashmir, <http://www.ummah.org.uk/kashmir/docs/resolution.htm> (diakses 29 Juni 2005).

³ Sir Frediric Bennett, "Excerpts from Kashmir Today", dalam Mashad (2004:10).

I have stated our government's policy and made it clear that we have no desire to impose our will on Kashmir, but leave the final decision to the people of Kashmir (3 November 1947).

We have given our pledge to the people of Kashmir and subsequently to the United Nations. We stood by it and stand by it today. Let the people of Kashmir decide (12 February 1951).

Akibat dari perang ini adalah dibentuknya garis gencatan senjata (*Cease-Fire line*, CFL) disepanjang daerah-daerah yang diduduki kedua belah pihak. Tahun 1972 garis ini berganti nama menjadi garis kontrol (*Line of Control*, LOC). Tapi pembagian wilayah berdasarkan garis kontrol tersebut tidak meredakan sengketa India-Pakistan sebab keduanya menginginkan penguasaan atas seluruh wilayah Kashmir.

Sepertiga wilayah Kashmir dikuasai oleh Pakistan yang kemudian dikenal sebagai azad Kashmir dengan pusat di Muzaffarabad. Sementara India menguasai duapertiga dengan ibukota Srinagar (walaupun kemudian terjadi perubahan ketika Cina menguasai bagian Timur Laut Jammu-Kashmir) (Anonim 2003:135).

Pada tahun 1965 pecah perang India-pakistan yang kedua akibat ketidakpuasan penyelesaian masalah Kashmir. Faktor-faktor pemicunya adalah, antara lain, kegagalan diplomasi, pembangunan militer India yang demikian besar, dan usaha India untuk mengintegrasikan wilayah Kashmir Pakistan ke India.⁴ Atas sikap dan provokasi India tersebut Pakistan merasa khawatir jika India akan mengambil wilayah Kashmir yang sudah mereka kuasai.

Pemimpin Pakistan menyusun gerakan anti India untuk mendukung gerakan agar Kashmir sepenuhnya bergabung dengan Pakistan. Pada bulan Agustus tahun 1965 tentara Pakistan masuk ke lembah Kashmir yang masuk ke wilayah India untuk menggerakkan pemberontakan Muslim Kashmir. Tapi oleh muslim Kashmir, penyusup ini diserahkan kepada tentara India. Setelah itu tentara India dan Pakistan berkumpul di sepanjang perbatasan kedua negara. Pertempuran terjadi di sepanjang perbatasan sekitar Punjab dekat Lahore, berlanjut sampai bulan September ketika PBB mengeluarkan resolusi 211 tanggal 20 September 1965 untuk gencatan senjata. India menerima resolusi tersebut tanggal 21 September sedangkan Pakistan menerima tanggal 22 September. Kedua negara kemudian mengadakan pembicaraan damai di Tashkent—wilayah Uni Soviet, ibukota Uzbekistan sekarang. Pada tanggal 10 Januari 1966 kedua belah pihak menandatangani perjanjian Tashkent yang isinya

⁴ Beberapa langkah India menunjukkan itikad kurang baik untuk penyelesaian masalah Kashmir. Majelis konsituante Jammu-Kashmir (boneka India) pada 6 Februari 1954 meratifikasi bergabungnya wilayah Kashmir ke India. Pada 19 November 1956 Majelis Konstituante juga menyetujui konstitusi konstitusi yang menyatakan wilayah Jammu-Kashmir bagian integral India. Pada 26 Januari 1957 India menyatakan bergabungnya Kashmir ke India tidak dapat dibatalkan

adalah penarikan tentara kedua negara ke posisi sebelum perang, akan diadakannya negosiasi baru untuk masalah Kashmir, dan membangun hubungan ekonomi dan perdagangan yang lebih baik. *Tashkent Agreement* sekalian menegaskan kembali bahwa garis gencatan senjata (CFL) adalah batas secara *de facto* kedua negara di wilayah sengketa itu.

Pentingnya Kashmir

Baik Pakistan dan India mengklaim Kashmir sebagai wilayahnya dengan alasan-alasan masing-masing. Bagi Pakistan ada beberapa alasan untuk menunjukkan pentingnya Kashmir, yaitu:

1. Sewaktu berdirinya negara Pakistan, alasannya adalah untuk membentuk negara Muslim di Asia selatan. Sebab itu argumentasi bahwa Kashmir yang mayoritas Muslim seharusnya bergabung dengan Pakistan. Perlu dicatat bahwa pada tahun 1950, dari 4.370.000 penduduk Jammu-Kashmir, 3.101.247 jiwa atau 77,1 persen adalah Muslim, sedangkan Hindu hanya sekitar 20,1 persen, dan yang beragama Sikh 1,64 persen. Fakta ini menjadi alasan kuat bagi Pakistan untuk mengklaim wilayah ini sesuai dengan logika alasan berdirinya negara Pakistan
2. Secara geografis Kashmir lebih terkait kepada Pakistan sebab untuk mencapai Kashmir lebih terbuka dari Pakistan. Sampai sekarang cara termudah untuk mencapai Kashmir adalah dengan melalui bagian barat Punjab lewat Sialkot dan Rawalpindi (Pakistan). Paska Perang tahun 1947 India memang membangun jalan melalui Pathanakot tetapi sangat jelek karena kondisinya yang sangat terjal. Oleh karena itu secara ekonomi wilayah Kashmir lebih terikat kepada Pakistan sebagai jalan masuknya.
3. Air sungai Indus, Chenab dan Jhelum semuanya mengalir melalui Kashmir yang sangat penting artinya bagi pertanian di Pakistan. Oleh sebab itu kalau tidak menguasai Kashmir maka sangat berbahaya bagi pertaniannya yang tergantung kepada ketiga sungai tersebut.
4. Keindahan dan kemakmuran yang dimiliki Kashmir terkenal di seluruh dunia yang akan berarti untuk perekonomian Pakistan.
5. Wilayah Kashmir memiliki posisi strategis yang penting. Wilayah ini terletak di dataran tinggi yang bergunung, dari sana posisi kedua negara mudah untuk dipantau (Mashad 2004:37-38).

Sementara arti penting Kashmir bagi India adalah:

1. Alasan strategis. Wilayah Jammu-kashmir yang bergunung-gunung sangat bagus untuk wilayah pertahanan. Apalagi wilayah ini berbatasan langsung dengan Tibet, Cina, Afghanistan dan Uni Soviet (sekarang negara-negara Asia Tengah), sehingga Jammu-Kashmir menjadi pintu depan terhadap dunia luar.

2. Secara ekonomis Kashmir merupakan wilayah yang sangat potensial, mengingat daerah ini terkenal subur sebagai lumbung padi dan sayur-sayuran. Selain itu memiliki panorama yang indah sehingga sangat berharga untuk dijadikan daerah wisata (Mashad 2004:72).

Bagi India, Kashmir menjadi satu komoditas politik yang penting untuk menguatkan sentimen di antara rakyatnya yang mayoritas beragama Hindu. Mengingat sekarang nasionalis Hindu menguat poisisinya dalam konstelasi politik India. Kubu ini memiliki persepsi politik Akhan Bharat, yakni keinginan untuk menyatukan seluruh sub-kontinen India dalam satu negara, India Raya. Oleh karena itu mereka beranggapan masalah Kashmir adalah masalah harga diri dan kedaulatan. Selain itu ketakutan India jika Kashmir lepas adalah preseden akan menguatnya tuntutan serupa dari kaum Sikh di Punjab. Atau mungkin akan muncul tuntutan dari kelompok-kelompok yang lain (lihat Mashad 1999:104).

Bagi Pakistan, ancaman terror India terhadap penduduk Kashmir India mengakibatkan beban ekonomi meningkat,⁵ karena banyak pengungsi yang masuk ke wilayah Pakistan baik secara resmi maupun tidak resmi. Jika dijumlahkan, maka sejak tahun 1990 sampai Januari 2001 ada 16.982 pengungsi resmi yang meninggalkan India dan menetap di kamp-kamp pengungsi di wilayah Pakistan. Jumlah ini akan membengkak jika ditambahkan dengan pengungsi yang tidak resmi, apalagi kalau dihitung mundur sejak awal konflik ini. Maka, dana yang dikeluarkan pemerintah Pakistan sangat besar di luar biaya yang dibutuhkan militer untuk mengimbangi militer India.

Olah karena itu dapat dipahami jika Pakistan berusaha keras untuk memunculkan masalah Kashmir ke dunia Internasional terutama dalam kerangka pelaksanaan plebisit sesuai dengan Resolusi PBB no 47 tahun 1948. Sementara India beranggapan campur tangan PBB tidak diperlukan, sesuai dengan Perjanjian Simla tahun 1972.⁶ Dalam interpretasi India, penyelesaian masalah Kashmir hanya melalui kerangka bilateral dan diplomasi kedua negara tanpa melibatkan PBB. Sementara bagi Pakistan, Perjanjian Shimla diinterpretasikan sebagai penerimaan peran PBB atau pihak ketiga lainnya yang lebih besar (Monshipouri 1993:717).

⁵ Pakistan menyiapkan dana untuk pengungsi meliputi (dalam rupee): 1) Bantuan ketika datang 600-2.000 Rs/kk; 2) Bantuan untuk kehidupan sehari-hari: a) 600 rs/kepala/bulan, b) 690 Rs/kepala keluarga/bulan; 3) Bantuan per kasus kematian 1.000 Rs; 4) Kesehatan: gratis; 5) Listrik: gratis; 6) Air minum: gratis; 7) Pendidikan: gratis; 8) Buku untuk semua murid: gratis; 9) Bantuan pendidikan: a) kelas 6-10 100Rs/bulan, b) Pendidikan lebih tinggi 150 Rs/bulan, c) Santri penghapal Qur'an 100 Rs/bulan; 10) Bantuan kaum pengungsi cacat 100Rs/bulan.

⁶ Isinya India menguasai Lembah Kashmir, Jammu dan Ladakh sedangkan Pakistan menguasai Azad Kashmir dan Northern Area. Jasit Singh, "Pakistan Occupied Kashmir", Under The Jackboot, New Delhi 1995, dalam Mashad (2004:96).

India selalu melakukan gerakan peredaman (khususnya melalui kekerasan) terhadap rakyat Kashmir, apalagi di era pemerintahan nasionalis Hindu melalui BJP (Bharatiya Janata Party). Dengan kebijakan represif ini pengungsi Kashmir terus bertambah, sehingga dapat dipahami kalau Pakistan tidak mau tinggal diam karena selalu berada pada posisi dirugikan.

Sikap represif India ini mengakibatkan makin kuatnya desakan untuk lepas dari India. Realitasnya keinginan itu memunculkan gerakan-gerakan bersenjata di tengah-tengah masyarakat pada awal tahun 1980-an. Mereka adalah Front Pembebasan Jammu dan Kashmir (*The Jammu and Kashmir Liberation Front*, JKLF) yang pro kemerdekaan Kashmir. Sedangkan kelompok yang pro-Pakistan adalah Hizbul Mujahideen dan Kekuatan Muslim Janbaz (*Moslem Janbaz Force*, MJF) yang oleh pemerintah India dianggap sebagai kelompok-kelompok separatis (Monshipouri 1993:716). Ada lagi kelompok Jaish-e-Mohammad dan Laskar-e-Tayyaba.

Kaum gerilyawan ini dibantu oleh rakyat Pakistan, Afghanistan dan Arab yang berjuang bersama-sama yang didasari oleh persamaan sebagai Muslim. Sementara pemerintah Pakistan mendukung dengan menyediakan kebutuhan gerilyawan dan berusaha mencegah India untuk menggunakan kekuatan bersenjatanya di wilayah perbatasan.

Tindakan kelompok gerilyawan Kashmir yang paling brutal adalah bom bunuh diri ke gedung Parlemen India di New Delhi tanggal 13 Desember 2001. Tindakan yang menewaskan 14 orang ini dilakukan oleh Laskar-e-Tayyaba.

Ketegangan semakin meningkat karena kedua negara bertetangga mulai menggunakan senjata nuklir untuk menakut-nakuti lawannya. Pada bulan Mei tahun 1998 pemerintah baru India di bawah pimpinan PM Atal Bihari Vajpayee—pemimpin Bharatiya Janata Party—melakukan serangkaian tes nuklir pertama setelah 24 tahun tidak pernah melakukannya. Vajpayee menegaskan bahwa tes nuklir ini diperlukan untuk meyakinkan keamanan India. Serta menegaskan akan membangun kekuatan nuklir India lebih besar lagi.⁷

Test nuklir India ditanggapi oleh pemerintahan Pakistan dengan melakukan serangkaian uji coba nuklir berdaya jelajah 1400 km yang dilakukan pada bulan Mei itu juga di daerah Chagai sekitar perbatasan Pakista-Iran. Perdana Menteri Nawaz Sharif mengatakan tes itu dilaksanakan jauh dari wilayah India untuk menjaga *Balance of Power* di Kawasan tersebut (Andrabhi n.d). Sikap Pakistan ini menunjukkan bahwa mereka sudah mengembangkan dan memiliki nuklir walaupun sebelumnya tidak pernah diberitakan.

Pemerintah di berbagai belahan dunia kecewa dengan tes nuklir India dan Pakistan tersebut. Padahal kedua negara telah menandatangani *Comprehensive Test*

⁷ 1998: Nuclear Tests in India and Pakistan Provoke International Outcry, Microsoft Encarta Reference Library 2005.

Ban Treaty tahun 1996 yang ditandatangani oleh 149 negara, yang pada intinya melarang semua tes nuklir.

Apapun dasarnya, pengembangan senjata nuklir oleh dua negara di Asia Selatan ini telah menambah rumit penyelesaian konflik Kashmir. Amerika Serikat yang awalnya tidak terlalu peduli dengan masalah Kashmir, karena Kashmir tidak punya kontribusi besar untuk perekonomian dunia seperti negara-negara Arab, sekarang bersikap sebaliknya. Amerika berkepentingan agar kedua negara dapat menahan diri dalam pengembangan senjata nuklirnya dengan ikut menandatangani Perjanjian Non- Proliferasi Nuklir di Asia Selatan (Mashad 2004:178). Sebab bagaimanapun kepemilikan senjata nuklir kedua negara ini menebarkan ancaman bukan hanya kepada dua belah pihak tapi ke negara-negara lain di sekitarnya.

Kesimpulan

Hubungan India-Pakistan mengalami pasang surut, antara damai dan bertikai. Pada permukaannya memang terlihat damai dan tenang, tapi berbeda pada realitasnya. Hubungan ini terus memburuk sebab tidak ada penyelesaian pada permasalahan Kashmir yang muncul setua umur kedua negara itu. Selalu saja ada konflik-konflik bersenjata. Munculnya gerakan gerilyawan Kashmir yang cenderung meningkat sejak tahun 1980-an menambah buruk situasi.

India yang defensif tetap kukuh pada pendiriannya bahwa keseluruhan wilayah Kashmir menjadi bagian negaranya. Sikap Pakistan yang ofensif tidak berbeda dengan India yang menganggap seluruh wilayah Kashmir merupakan bagian negaranya. Pertemuan dua sikap yang didasarkan oleh persepsi yang berbeda ini mengakibatkan masalah ini berlarut-larut, sekalipun campur tangan PBB sudah ada sejak permulaan konflik ini

Keadaan yang demikian semakin diperparah lagi dengan pengembangan persenjataan keduanya, khususnya senjata nuklir. Apapun dalih pengembangan senjata nuklir itu, ia tetap saja sebagai sebuah senjata yang dapat digunakan untuk mengancam. Yang dikhawatirkan adalah akibat ancamannya yang bersifat destruktif, tidak hanya akan berakibat pada kedua negara itu, tapi lebih luas lagi, ke wilayah Asia Selatan dan kawasan Asia lainnya.

Daftar Pustaka

- Andrabhi, Syed M Inayatulla. n.d. *What Motivates India's Activism - A Closer Examination in a Global Framework*. <http://www.ummah.org.uk/kashmir/docs/SaamotO.htm> (diakses 29 Juni 2005)
- Anonim. 2003. *Negara dan Bangsa Jilid 3*. Jakarta: Grolier Internasional Inc.
- Ganguly, Sumit. 2005. "Indo-Pakistani Wars". Dalam *Microsoft Encarta Reference Library*.

Monshipouri, Mahmood. 1993. "Backlash to the Destruction at Ayodhya." Dalam *Asian Survey*, Vol. XXXIII, No 7, Juli.

Mashad, Dhurorudin. 1999. *Agama Dalam Kemelut Politik: Dilema Sekularisme di India*. Jakarta: Pustaka Gresindo

Mashad, Dhurorudin. 2004. *Kashmir: Derita Tak Kunjung Usai*. Jakarta: Khalifa.

Media Massa

Kompas, 10 Januari 2004.

Kompas, 7 Januari 2002.

Sumber Online

<http://www.incore.ulst.ac.uk/cds/countries/kashmir.html>

<http://www.ummah.org.uk/kashmir.html>

Database

Microsoft Encarta Reference Library 2005.